

**RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOJONEGORO
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancanagan Akhit Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dasar acuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dimaksud untuk mengukur Kinerja Instansi dan Pelaksanaan Program setiap Tahun secara Akuntabel serta untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur pelaksana. Adapun Penyusunan Rencana Program/ Kegiatan disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten atas dasar perhitungan yang mendalam mengenai Potensi, Peluang dan Kendala yang mungkin akan dihadapi sehingga secara proaktif menyiapkan perubahan yang mungkin akan terjadi guna mewujudkan suatu tata Pemerintahan yang baik .

Diharapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dapat lebih meningkatkan Kinerja dan memberikan Pelayanan Prima.

Demikian semoga dapat menjadi dasar bagi segenap pihak dalam menilai Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro untuk tiap tahun tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Bojonegoro, 8 Agustus 2024
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



Drh. CATUR RAHAYU K. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661222 199403 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Bojonegoro dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

12. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bojonegoro (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan agar program dan kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sinergi dan terarah.

b. Tujuan

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
2. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi: 1) Latar Belakang, mengemukakan pengertian rungas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 2) Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Tugas dan fungsi PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, 3) Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD, 4) Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap RENSTRA OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/ internasional; 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisi uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Dinas PPeternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dirancang awal RKPD atau program dan kegiatan cocok baik program dan besarannya .

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten bila sudah dilakukan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakann dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD Berisi rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Berisi rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai factor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan mengenai faktor-faktor yang menjasi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dan table Rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses evaluasi harus dilakukan pada renja tahun 2022 dan Renja 2023 yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil dari rencana program dan kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan unsur dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi anggaran program / kegiatan
- b. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya dan
- d. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya.

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan sekaligus pencapaian Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dapat dicermati bahwa tidak seluruh program yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis dapat terealisasi. Adanya beberapa mengakibatkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan pada Renstra.

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2023	Realisasi		
				Th. n-2 (2021)	Th. n-1 (2022)	Th. N (2023)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya populasi dan Produksi Ternak	Produktivitas peternakan peningkatan populasi ternak (ekor)				
		Sapi (ekor)	278.370	258.563	274.253	274.926
		Kambing (ekor)	168.534	154.758	159.496	160.174
		Domba (ekor)	213.179	198.149	197.259	203.451
		Ayam ras pedaging (ekor)	2.589.605	2.392.699	2.738.720	2.768.420
		Ayam ras petelur (ekor)	117.615	107.495	124.675	127.012
		Ayam buras (ekor)	1.662.417	1.633.128	1.716.896	1.718.744
		Peningkatan produksi ternak (ton)				
		Daging (ton)	37.759	34.825	38.026	38.453,03
		Telur (ton)	2.378	2.120	2.288	2.319,72
	Meningkatnya Produksi ikan	Jumlah Produksi Ikan (ton)	6.122	5.801,58	5.989	6.230,07

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi dari peningkatan populasi sapi, kambing, domba, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan ayam buras mengalami peningkatan di setiap tahunnya Untuk peningkatan produksi daging dan telur juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk peningkatan produksi ikan mengalami kenaikan setiap tahunnta.

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi 2023	% Capaian
1	Meningkatnya populasi dan produksi hasil ternak				
	Jumlah Populasi Ternak	n - (n - 1) Jumlah populasi ternak tahun sekarang dikurangi jumlah populasi ternak tahun sebelumnya			
	- Sapi		278.370 ekor	274.926	-1,2
	- Kambing		168.283 ekor	160.174	-4,9
	- Domba		203.181 ekor	203.451	-4,5
	- Ayam ras pedaging		2.766.108 ekor	2.768.420	6,9
	- Ayam ras petelur		126.051 ekor	127.012	7,9
	- Ayam buras		1.734.067 ekor	1.718.744	3,3
	Jumlah produksi hasil ternak	n - (n - 1) Jumlah produksi hasil ternak tahun sekarang dikurangi jumlah produksi hasil ternak tahun sebelumnya			

	- Daging		38.607,24 ton	38.453,03	1,8
	- Telur		2.305,85 ton	2.319,72	1,8
2	Meningkatnya produksi perikanan				
	- Jumlah Produksi Ikan	n - (n-1) Jumlah produksi perikanan budidaya tahun sekarang dikurangi jumlah produksi perikanan budidaya tahun sebelumnya	6.112 ton	6.230,07	1,7

Dari tabel diatas ada beberapa populasi ternak yang mengalami penurunan atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kematian ternak dan bertambahnya pengeluaran ternak baik ke kabupaten dan pprovinsi.

Jumlah produksi ikan mengalami peningkatan karena didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Meningkatnya penebaran ikan di perairan umum (restocking).
2. Meningkatnya jumlah pembudidaya ikan.
3. Pembudidaya ikan menerapkan teknologi intensifikasi dalam budidaya.
4. Adanya bantuan sarana prasarana budidaya ikan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Adapun analisis gambaran pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana tabel di bawah :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM/IKU/IKK atau Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
		Th (n-3) 2020	Th (n-2) 2021	Th (n-1) 2022	Th (n) 2023	Th (n+1) 2024	Th (n-3) 2020	Th (n-2) 2021	Th (n-1) 2022	Th (n) 2023	Th (n+1) 2024		
eringkatan opulasi dan roduksi anak	Layanan Inseminasi Buatan (IB) ekor	64.000	67.000	67.000	67.000	70.000	65.328	62.202	67.000	67.000	70.000		
	Layanan Kesehatan Hewan												
	- Pelayanan terpadu ternak (sapi, kambing, domba)	5.000	3.500	2.600	2.600	2.650	5.988	3.603	2.600	2.600	2.650		
	- Pelayanan semi aktif	12.000	13.000	13.000	13.000	13.500	12.934	13.500	13.000	13.000	13.500		
	- Vaksinasi SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Vaksinasi AL (unggas)	40.000	45.000	30.000	23.500	24.000	40.029	45.000	30.000	23.500	24.000		
eringkatan roduksi erikanan	Layanan Balai Benih Ikan (BBI) ekor	1.250.000	1.400.000	1.470.000	1.545.000	1.591.000	1.194.500	1.371.900	1.470.000	1.545.000	1.591.000		
	Edukasi Perikanan Siswa	covid	covid	-	-	-	50		-	-	-		

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan satuan kerja perangkat daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro Tahun 2024 ini, merupakan rencana kerja Tahunan yang memuat prioritas pembangunan yang pendanaanya bersifat indikatif berdasarkan sinkronisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain ada 3 (tiga) hal yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program serta hasil rencana program oleh pembangunan ekonomi yang berkualitas mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang makin mandiri, sejahtera dan berdaya saing serta berkelanjutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	13.661.190.761	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100	13.661.190.761	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kegiatan	100	771.684.952	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kegiatan	100	771.684.952	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hsl koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hsl koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	670.784.952	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	670.784.952	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	93.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	93.400.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		rata-rata capaian kegiatan	100	11.390.301.256	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		rata-rata capaian kegiatan	100	11.390.301.256	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69	10.992.381.256	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69	10.992.381.256	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	397.920.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	397.920.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian kegiatan	100	457.934.321	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian kegiatan	100	457.934.321
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	38.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	38.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	272.081.938	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	272.081.938
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	28.302.383	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	28.302.383
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	15.600.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	15.600.000
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	24	4.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	24	4.500.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	99.450.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	99.450.000
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	rata-rata capaian kegiatan	100	827.569.632	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	rata-rata capaian kegiatan	100	827.569.632
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	120.066.000	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	120.066.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	144	707.503.632	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	144	707.503.632
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	rata-rata capaian kegiatan	100	223.617.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	rata-rata capaian kegiatan	100	223.617.800
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	223.617.800	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	223.617.800
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1178	201.882.750	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1178	201.882.750
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Rata rata capaian kegiatan	100	201.882.750	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Rata rata capaian kegiatan	100	201.882.750
Pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	1	201.882.750	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	1	201.882.750
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	5235	2.063.232.400	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	5235	2.063.232.400

Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Rata-rata capaian kegiatan	100	2.063.232.400	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Rata-rata capaian kegiatan	100	2.063.232.400
Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	660	938.599.000	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	660	938.599.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2	1.124.633.400	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2	1.124.633.400
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah ikan yang diolah	1095	406.220.500	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah ikan yang diolah	1095	406.220.500
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	rata-rata capaian kegiatan	100	406.220.500	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	rata-rata capaian kegiatan	100	406.220.500
Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kab/kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kab/kota	1	40.049.500	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kab/kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kab/kota	1	40.049.500
Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kab/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kab/kota yang terfasilitasi	60	366.171.000	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kab/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kab/kota yang terfasilitasi	60	366.171.000
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana peternakan /pakan dan bibit yang disediakan	4	636.054.500	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana peternakan /pakan dan bibit yang disediakan	4	636.054.500
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan	100	189.249.500	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kegiatan	100	189.249.500
Pengawasan Mutu Bahan Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12	157.497.500	Pengawasan Mutu Bahan Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12	157.497.500
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12	31.752.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12	31.752.000
Pengendalian dan Pengawasan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan	rata-rata capaian kegiatan	100	446.805.000	Pengendalian dan Pengawasan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan	rata-rata capaian kegiatan	100	446.805.000

Ternak dalam Daerah Kab/Kota						Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota					
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak		Jumlah benih atau bibit ternak yang beredar	12		446.805.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak		Jumlah benih atau bibit ternak yang beredar	12		446.805.000
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase kelompok pembibit sapi PO	42		67.769.500	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase kelompok pembibit sapi PO	42		67.769.500
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Daerah Kabupaten/Kota		rata-rata capaian kegiatan	100		67.769.500	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Daerah Kabupaten/Kota		rata-rata capaian kegiatan	100		67.769.500
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	1		67.769.500	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	1		67.769.500
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase ternak besar yang sehat	95.5		1.145.797.477	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase ternak besar yang sehat	95.5		1.145.797.477
		Persentase ternak kecil yang sehat	97					Persentase ternak kecil yang sehat	97		
		Persentase ternak unggas yang sehat	97					Persentase ternak unggas yang sehat	97		
		Persentase penanggulangan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100					Persentase penanggulangan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100		
		Persentase peningkatan penyediaan produk hewan yang ASUJH	1					Persentase peningkatan penyediaan produk hewan yang ASUJH	1		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota		rata-rata capaian kegiatan	100		180.250.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota		rata-rata capaian kegiatan	100		180.250.000
Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam satu daerah kab/kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (laporan)	12		180.250.000	Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam satu daerah kab/kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (laporan)	12		180.250.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota		rata-rata capaian kegiatan	100		377.378.477	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota		rata-rata capaian kegiatan	100		377.378.477
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12		25.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12		25.000.000

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	352.378.477	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	352.378.477
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner	rata-rata capaian kegiatan	100	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner	rata-rata capaian kegiatan	100
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	12	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	12
Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	12	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	12
Pengawasan unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	5	Pengawasan unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	5
Prog. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Persentase ternak sapi betina peserta AUTS	1.4	Prog. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Persentase ternak sapi betina peserta AUTS	1.4
Keg. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota	rata-rata capaian kegiatan	100	Keg. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota	rata-rata capaian kegiatan	100
Penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan	12	Penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan	12
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak yang dibina	18	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak yang dibina	18
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	rata-rata capaian kegiatan	100	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	rata-rata capaian kegiatan	100
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	6
		18.386.264.888			18.386.264.888

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten. Program/kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Review Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro terhadap RKPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel berikut :

REKAPITULASI ALOKASI DANA DAN REALISASI BELANJA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian (%)	Capaian Persentase Fisik (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	1.399.700	99	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.400.000	1.399.400	99	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA SKPD	1.400.000	1.369.000	97	100 %
	Koordinasi & Penyusunan DPA SKPD	1.400.000	1.373.000	98	100 %
	Koordinasi & Penyusunan DPA Perubahan SKPD	1.400.000	1.369.000	97	100 %
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	662.466.680	635.863.985	95	100 %
	Evalusi kinerja perangkat daerah	93.400.000	91.166.800	97	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan gaji & tunjangan ASN	8.294.393.180	7.107.150.871	92	100 %
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	341.070.000	321.550.000	94	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16.280.000	15.725.000	96	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	54.700.000	54.461.200	99	100 %
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	431.732.103	415.535.930	96	100 %
	Penyediaan peralatan rumah tangga	55.950.209	55.297.600	98	100 %
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.934.800	45.501.500	99	100 %

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.500.000	4.476.000	99	100 %
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	155.175.000	154.798.740	99	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	159.993.736	154.958.557	96	100 %
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	711.180.088	693.712.952	97	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	191.161.800	180.350.350	94	100 %
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam daerah Kab/Kota				
	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	117.555.500	112.748.900	95	100 %
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	391.999.500	379.706.296	96	100 %
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kab/kota	320.635.000	319.695.736	99	100 %
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota				
	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	1.396.867.000	1.395.808.250	99	100 %

	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kab/kota	110.729.000	108.387.241	97	100 %
5	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				
	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kab/kota				
	Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/Tanaman skala kecil	1.511.382.000	1.359.293.527	89	100 %
	Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	36.742.000	36.398.100	99	100 %
	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota				
	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	348.36.700	334.696.610	96	100 %
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
	Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kab/kota				
	Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	97.464.300	92.997.215	95	100 %
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota				
	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	287.991.000	286.828.332	99	100 %
	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kab/kota	86.500.000	81.238.286	93.92	100 %

	Penyediaan pelayanan jasa laboratorium	30.000.000	29.429.060	98	100 %
	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	375.192.812	315.668.480	84	100 %
	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	494.970.000	483.800.322	97.74	100 %
	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	573.889.000	564.705.430	98	100 %
	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	292.628.000	271.394.032	92	100 %
	Penetapan pemenuhan persyaratan teknis	226.755.816	224.997.976	99	100 %
9	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota				
	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota				
	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkrkebunan, peternakan Kesehatan hewan	79.825.000	72.762.500	91	100 %
10	Program Penyuluhan Pertanian				
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kec/desa	169.261.000	167.927.690	99	100 %
		17.592.191.224	16.010.653.232	91	100%

Anggaran belanja Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2023 sebesar Rp 17.592.191.224 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.010.653.232 atau persentase realisasi 91,01 % .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, maupun dari musrenbang kecamatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

- a) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
- b) Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD

Dalam usulan melalui musrenbang tahun 2024 Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro ada 2 (dua) usulan dari masyarakat yaitu usulan Bimtek Pengolahan Limbah Pakan dari Kecamatan Gondang Desa Jari dan Kecamatan Sukosewu Desa Klepek.

(Usulan Musrenbang 2024)

No	Pengusul/Kades/Lurah	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Usulan	Alamat Lokasi	Kategori Belanja
1	Paryono	Jari	Gondang	Bimtek pengolahan limbah pakan	Dusun Kramat, Sambong RT 10, 11, 12 Kab Bojonegoro	Belanja Program (Barang Jasa
2	Efendi	Klepek	Sukosewu	Bimtek pengolahan limbah pakan	Dusun Sidomulyo RT 013 RW 003 Kab. Bojonegoro	Belanja Program (Barang Jasa

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro

: Dinas Peternakan dan Perikanan

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Prpgram dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100 %	100%	100	100	34	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun	20	20	20 dokumen	20	100	20	20	20
2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	1	1	1 dokumen	1	100	1	1	1
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1	1	1 dokumen	1	100	1	1	1
2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1	1	1 dokumen	1	100	1	1	1
2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1	1	1 dokumen	1	100	1	1	1

2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1	1	1	100	1	1	1
2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	12	12	12	100	12	12	36
2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	12	100	12	12	12
2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dan tunjangan nya tersedia	72	72	72	100	72	72	72
2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	12	12	100	12	12	12
2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi perangkat daerah	12	12	12	100	12	12	12
2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	1	100	1	1	1
2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	1	100	1	1	1
2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	1	100	1	1	1
2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	1	1	100	1	1	1
2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	1	1	100	1	1	1
2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	1	1	1	100	1	1	1
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis layanan untuk penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	12	100	12	12	12

2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12	12	12 bulan	12	100	12	12	12	12
2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12 bulan	12	100	12	12	12	12
2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12 bulan	12	100	12	12	12	12
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	7	7	7 Unit	7	100	7	7	7	7
2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	7	7	7 unit	7	100	7	7	7	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKATAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	149.44 ton		1114 Ton	1092	98.03	149.44	149.44		
2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	cakupan bina kelompok nelayan	240		240 orang	40	16.67	240	240		
2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	jumlah nelayan yang difasilitasi dalam pembinaan dan penebaran ikan diperairan umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			jumlah nelayan yang difasilitasi dalam pembinaan dan penebaran ikan diperairan umum	170		50 nelayan	240	100	170	170		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKATAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4851		4851 Ton	4710	97.09	4851	2663		
2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	cakupan wilayah potensi budidaya yang dikelola	28		28 lokasi	28	100	28	28		
2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah lokasi pembinaan kelompok perikanan budidaya dan bintek teknis budidaya ikan	-		24 lokasi	10	41.67	-	-		

2.04	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah operasional balai benih ikan	1310	90 ekor induk lele	-	-	1310	
			jumlah operasional balai benih ikan		3600 Kg pakan ikan				
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah ikan yang diolah	1071	1003 Ton	100	1071	700	
2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah ikan yang dipasarkan		36500 ton	97.09	-	-	
2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta gemarikan	200	100 Orang	100	200	200	
2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pelatihan olahan	175	30 orang	-	175	175	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100 %	66,45	100	34	
2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun	20	20 dokumen	100	20	20	
2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun	3	3 dokumen	100	1	1	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pakan dan bibit yang disediakan	2	2 %	2	100	1	
2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta bimtek peningkatan mutu pakan	-	30 orang	100	-	-	
2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah uji sampel bahan pakan/pakan ternak	25	27 sampel	100	25	12	

2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	jumlah demlot hijauan pakan ternak	-		3 Ha	10	100	-	-	
			Jumlah pengadaan pupuk organik	-		3000 Kg	10000	100	-	-	
2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelayanan IB	-		64000 aksept or	67176	100	-	-	
2.05	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	jumlah pendampingan sarana pelayanan IB (N2)	1520		2510 liter	2523	100	1520	1520	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kelompok pembibit sapi PO	41		41%	33	75	41	20.50	
2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah kelompok pembibit sapi PO	8		8 kelompok	4	50	8	8	
2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pembinaan peternak pembibit sapi PO	-		5 kali	4	80	-	-	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase ternak besar yang sehat	95		95% %	85	89.47	95	36	
2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan kesehatan hewan yang disediakan	33600		33600 ekor	49355	100	33600	20160	
2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah eradikasi agen penyakit diarea peternakan	30		30 liter	115	100	30	30	
			jumlah pemberian layanan kesehatan aktif	3000		2975 dosis	4050	100	3000	2200	
			Jumlah pemberian vaksin hewan yang dilakukan	30000		30000 dosis	45000	100	30000	17000	
2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	450		470 sampel	100	21.28	450	46	

2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah kasus penyakit yang diuji cepat (rapid test)	30		30 kasus	30	100	30	30
			jumlah pengambilan dan pengujian sampel	420		420 sampel	1000	100	420	170
2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pengambilan dan pemeriksaan feses sapi	-		50 ekor	196	100	-	-
			Jumlah peningkatan status kesehatan ternak sapi, kambing/domba	-		200 ekor	600	100	-	-
2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	prosentase unit usaha produk hewan yang dibina	70		71 %	70	98.59	70	32
2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah pelayanan informasi pasar	12		12 bulan	12	100	12	6
			jumlah peserta yang mendapat pembinaan	30		30 peserta	250	100	30	30
2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas tataniaga hewan dan produk hewan	12		12 bulan	12	100	12	9
			jumlah peserta dan unit usaha yang menerima pembinaan	70		70 unit usaha	70	100	70	37
			jumlah sampel dan pengujian mutu produk hewan	40		40 sampel	-	-	40	40
2.04	3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	jumlah pemotongan hewan	-		5800 ekor	5357	92.36	-	-
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase ternak yang disubsidi pemerintah	1.40		1 %	-	-	1.40	1.40
2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah premi asuransi ternak yang disediakan	490		1000 ekor	-	-	490	286
2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Ternak Peserta Asuransi	700		1000 ekor	-	0	700	405

		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani tani ternak yang dibina	-			18 %	18	100	-	-	
2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dibina	8			6 kelompok	18	100	8	5	
2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peserta Bimtek	-			200 Peternak	-	-	-	-	

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kementrian Pertanian

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I.

Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu,

menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Isu Pembangunan Gender

Pembangunan Gender Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Penurunan terhadap perempuan dewasa dan anak yang mengalami kekerasan fisik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian.

Isu Kemiskinan

Tingginya jumlah penduduk miskin merupakan isu yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah.

Isu Stunting

Setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini harus dapat diatasi bersama. Salah satu permasalahan yang dihadapi pada saat ini yaitu *Stunting*. Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui definisi dari *Stunting*. Menurut WHO, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Sebenarnya, permasalahan *Stunting* ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara. Dikutip dari www.antaranews.com, disebutkan bahwa WHO mengestimasi jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah (prevalensi) *Stunting* (balita kerdil).

Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutan di Pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN Halim Perdanakusuma Jakarta (tanggal 25 Januari 2023), menyampaikan bahwa dampak *stunting* ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh karena itu, diharapkan target persentase *stunting* di Indonesia pada tahun 2024 dapat turun hingga 14 persen . Presiden Republik Indonesia juga yakin bahwa dengan kekuatan bersama maka angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai, asal semuanya bekerja bersama-sama.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOJONEGORO

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks maka diperlukan manajemen pembangunan peternakan dan perikanan yang modern dan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Inseminasi Buatan
2. Pengembangan wilayah sumber bibit sapi lokal melalui uji performans.
3. Teknologi reproduksi (sinkronisasi birahi, ET)
4. Penanganan gangguan reproduksi
5. Pencegahan penyakit hewan menular strategis yang menyebabkan kematian ternak
6. Menjamin ketersediaan vaksin dan obat hewan yang memadai melalui pelayanan kesehatan hewan.
7. Pengawasan lalu lintas ternak.
8. Melakukan penyuluhan / menyampaikan informasi terkait agribisnis usaha peternakan
9. Konsumsi ikan di Bojonegoro tinggi

10. Jumlah SDM untuk usaha perikanan cukup tersedia
11. Lahan untuk usaha perikanan masih cukup tersedia
12. Membuat kolam terpal dan pasangan untuk daerah yang keterbatasan air dan menyarankan pembuatan embung-embung untuk menampung air.
13. Melakukan penyuluhan teknologi budidaya dan menggalakkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
14. Kebutuhan benih masih kurang

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

d	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

	Nelayan Kecil
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Pengelolaan Pembudidaya Ikan
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kab/kota
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
IV	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kab/kota
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN
V	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
VI	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
VII	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
VIII	Prog. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
	Keg. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota
	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan
IX	Program Penyuluhan Pertanian
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di kecamatan dan desa

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Tahun 2024 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas Program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari 9 Program, 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB IV. PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi arah dan langkah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu satu tahun ke depan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini sebagai acuan penjabaran program dan kegiatan tahunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan harapan terjaminnya kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan di bidang peternakan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

Keberhasilan pelaksanaan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.